



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 223/01122008
HARI : SENIN
TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Menlu Thailand: KTT ASEAN Mungkin Diundurkan	3
	Parlemen Asia Berdeklarasi: Pembentukan Arsitektur Baru Keuangan Global Didukung	3
	India Tuduh Pakistan di Balik Tragedi Mumbai	4
	Urgency in the air as climate talks commence	5
	RI-India Teken Empat MoU	5
	Serangan di India: Lashkar e-Taiba Asal Pakistan Dituduh Terlibat Aksi Teror di Mumbai	6
	KBRI Bangkok Bentuk Gugus Tugas Perikanan	7
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Presiden Imbau Rakyat Gunakan Hak Pilih	8
	B. EKONOMI	
	KRISIS KEUANGAN GLOBAL Indonesia Terkena Dampak Terbesar	9
	Indonesia Ajak Dunia Tinjau Konsensus Monterey	10
	PRODUK WARISAN BUDAYA Meski Krisis, Ekspor Kerajinan Meningkat	11
	Indonesia Butuh Investor Jangka Panjang	11
	C. SOSBUD	

		Depag dan DPR Atasi Krisis Transportasi Haji	12
	D.	HANKAM	
		KRISIS GLOBAL TNI AL Perketat Pengamanan Selat Malaka	13
	E.	HUKUM	
		KPK Dipersilakan Tangani Kasus Indover	14
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	--
	III.	ARTIKEL	
		Sudikah negara maju kembali ke perdagangan bebas? (oleh : Erna S. U. Girsang)	15
		Industri Strategis Indonesia (oleh Cyrillus Harinowo)	16
		"Si Kancil" Agen CIA? (oleh Sabam Siagian)	17
	IV.	LAIN-LAIN	--
	V.	EDITORIAL	
		Waging the war on terror	20
		Adam Malik Tetap Pahlawan	21

Jakarta, 1 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. **Menu Thailand: KTT ASEAN Mungkin Diundur**

MENTERI luar negeri Thailand, Minggu (30/11) mengatakan, kerajaan mungkin akan menunda pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN sampai Maret karena para pemrotes anti pemerintah masih terus menduduki dua bandara di Bangkok.

Sompong Amornvithat mengatakan bahwa kabinet Thailand akan memberikan keputusan akhir Selasa (2/12), apakah KTT ASEAN akan dilaksanakan sesuai jadwal yakni 15-18 Desember depan. "Ini menurut pendapat pribadi saya, namun Thailand mungkin akan menundanya, tapi penundaan tersebut tidak akan lama-mungkin ditunda sampai awal Maret," kata Sompong kepada stasiun televisi milik negara NBT.

"Namun hal itu tergantung pada keputusan kabinet, karena penundaan tidak hanya akan berpengaruh pada keuangan Thailand, tapi yang lebih penting adalah dampaknya terhadap citra negara."

Thailand, yang saat ini sebagai ketua ASEAN, sedang dilanda kekacauan politik, pada saat para pelaku aksi protes berusaha menumbangkan pemerintah dan Selasa menguasai bandara terbesar di negara itu, Suvarnabhumi serta terpaksa ditutup.

Para pendukung apa yang dinamakan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) juga menguasai bandara Don Mueang yang lebih kecil pada hari berikutnya, selain juga menduduki kantor kabinet Perdana Menteri Somchai Wongsawat sejak Agustus lalu.

Situasi politik yang kian memburuk di kerajaan itu telah memicu Laos, Kamboja dan Vietnam untuk mengisyaratkan ditundanya KTT ASEAN, dan membuat sekjen perhimpunan kawasan itu mengunjungi Thailand, Jumat, untuk mengamati situasi dari dekat.

Thailand mengumumkan pada akhir Oktober lalu, bahwa KTT ASEAN akan dipindahkan dari Bangkok ke Chiang Mai, daerah pertahanan pemerintah karena Somchai baru-baru ini telah memindahkan kendali negara saat aksi protes terus berlarut.

Pada Desember 2006, Filipina juga menunda KTT ASEAN tahun itu ke pulau Cebu sampai bulan berikutnya karena khawatir terhadap datangnya badai serta kecemasan kemungkinan akan terjadinya serangan teror. (Jurnal Nasional)

2. **Parlemen Asia Berdeklarasi: Pembentukan Arsitektur Baru Keuangan Global Didukung**

Para anggota Parlemen Asia yang tergabung dalam Majelis Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly, Sabtu (29/11), mengeluarkan Deklarasi Jakarta. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan perlunya membangun sebuah arsitektur keuangan global baru.

Majelis Parlemen Asia (APA) juga mendesak negara-negara Asia untuk menggalang pendanaan darurat bagi Asia. Hal itu disampaikan Presiden APA yang mengetuai Sidang Pleno Ketiga APA, Agung Laksono, Sabtu lalu di Jakarta.

Pendanaan darurat diperlukan guna membantu negara sedang berkembang dan memiliki fundamental ekonomi yang kuat untuk keluar dari pengaruh krisis keuangan global. APA juga mendukung upaya untuk menyusun kerangka kerja pengaturan bagi Asia dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan. "APA mendukung upaya mendirikan sebuah mekanisme ekonomi kawasan yang memiliki otoritas sebagai lembaga terakhir untuk mengatasi krisis keuangan," kata Agung.

Sidang APA yang berlangsung mulai hari Kamis (27/11) hingga Sabtu ditutup dengan menghasilkan lebih dari 10 resolusi yang disusun empat komite kerja, yaitu komite energi, komite sosial budaya, komite politik, dan komite ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Resolusi yang dihasilkan, antara lain, adalah tentang pemberantasan kemiskinan di Asia, Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Persahabatan dan Kerja Sama di Asia, serta resolusi-resolusi yang memberi jalan bagi APA untuk mendapatkan status sebagai pemantau di Organisasi Konferensi Islam, ASEAN, Majelis Umum PBB, dan Masyarakat Ekonomi Eurasia.

Tidak mampu

Dalam Deklarasi Jakarta, anggota Parlemen Asia menegaskan, pilar keuangan internasional saat ini yang berdasarkan sistem Bretton Woods tidak mampu membangun sebuah lingkungan keuangan yang stabil dan perdagangan internasional yang lebih adil.

"Ketiadaan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan telah menyumbang pada ketidakstabilan keuangan global dan menciptakan kondisi bagi tindakan spekulatif," tutur Agung.

Ketua Tim Penyusun Deklarasi Jakarta dan Laporan Akhir Sidang Pleno Ketiga APA Abdullah Toha menambahkan, APA setuju mengambil langkah-langkah untuk menciptakan sistem tata kelola keuangan yang baru.

"Parlemen Asia di bawah APA sepakat membentuk kelompok kerja yang akan mempelajari, meneliti, dan memberikan rekomendasi dalam sidang pleno yang akan datang, tentang bentuk dari tata kelola ekonomi dunia yang baru, untuk diperjuangkan oleh masing-masing parlemen melalui pemerintahnya," papar Abdullah.

Dia menambahkan, anggota APA juga sepakat Asia akan dan harus berperan lebih besar di masa datang. Oleh karena itu, APA terus mendorong integrasi Asia.

Mengenai resolusi soal kondisi kemanusiaan di Palestina, khususnya di Jalur Gaza, Ketua Komite Politik Marzuki Darusman menjelaskan, APA meletakkan sikap politiknya lebih pada situasi kemanusiaan. APA tidak bermaksud masuk lebih dalam ke persoalan politik Palestina-Israel.

Berdasarkan laporan komite-komite kerja dalam sidang paripurna, Sidang APA umumnya berjalan mulus. Hanya saja, dalam masalah Palestina, beberapa anggota sempat mempersoalkan sejumlah hal, terutama soal deklarasi yang dinilai kurang berimbang. (Kompas)

3. India Tuduh Pakistan di Balik Tragedi Mumbai

India memulai investigasi atas serangkaian serangan mematikan di Mumbai, kota terbesar di negeri itu, Minggu (30/11). Tuduhan India terhadap Pakistan dalam serangan yang menewaskan hampir 200 orang itu mempertegang hubungan kedua negara tetangga ini. Pakistan menolak tuduhan tersebut dan menginginkan bukti.

Perdana Menteri India Manmohan Singh mengadakan pertemuan darurat dengan pemimpin partai politik utama negara tersebut untuk mendiskusikan situasi saat ini. Dalam pernyataan beberapa saat setelah terjadinya serangan, Manmohan menyalahkan yang disebutnya "pasukan eksternal", ungkapan yang biasanya digunakan untuk mengacu pada para pejuang yang bermarkas di Pakistan.

Menanggapi tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Pakistan Mahmood Qureshi mengatakan hubungan dengan India kini berada di titik serius. Namun, dia berharap krisis ini tidak akan menjadi sumbu peledak. Dia menjanjikan intelijen Pakistan akan bekerja sama penuh dalam investigasi yang dilakukan India.

Pemerintah India merevisi jumlah korban dalam serangan itu, dari 195 korban tewas menjadi 174 orang, dengan korban luka-luka setidaknya 295 orang. Terdapat beberapa mayat yang dihitung dua kali. Namun, jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah sejalan dengan pencarian yang terus dilakukan di lokasi penyerangan.

Sebanyak 18 warga asing dilaporkan tewas dalam peristiwa itu, termasuk dari Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Israel, Inggris, Italia, Jepang, China, Thailand, Australia, dan Singapura. Setidaknya 20 pasukan keamanan juga ikut terbunuh.

Prajurit India masih mencari korban di Hotel Taj Mahal dengan 565 kamar tersebut. Sementara mayat-mayat korban mulai disemayamkan dan dikremasi. Sembilan dari 10 penyerang, tewas ditembak, satunya lagi ditangkap hidup-hidup oleh pasukan keamanan.

Banyak yang masih mengganjal di hati Pemerintah India mengenai peristiwa ini, khususnya mengenai tuduhan keterlibatan negara tetangga Pakistan. Apalagi setelah ditemukan fakta bahwa para penyerang tampaknya telah terlatih dan dipersiapkan dengan baik.

Belakangan diketahui bahwa mereka bersenjata canggih, dilengkapi teknologi *geo positioning system* (GPS), telepon seluler, dan satelit untuk berkomunikasi, serta laporan bahwa kelompok tersebut berulang kali melakukan kontak dengan negara asing yang belum teridentifikasi. Menurut investigasi awal, para penyerang berencana membantai 5.000 orang.

Media-media India lebih ramai menyalahkan Pemerintahan India sendiri beserta agen intelijennya. Muncul pula kecurigaan terhadap kelompok militan Lashkar-e-Taiba, yang dipercaya diciptakan oleh agen intelijen Pakistan untuk memperjuangkan perang tertutup mereka dengan India terkait persoalan Kashmir.

Muncul pula spekulasi bahwa serangan tersebut dilakukan oleh dua kelompok terkoordinasi. Satu kelompok memasuki Mumbai dengan kapal, sementara kelompok yang lain mempersiapkan properti penyerangan, menyediakan senjata dan bahan peledak, sebelum serangan diluncurkan.

Sebelumnya kelompok Deccan Mujahideen mengklaim diri bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan yang dilakukan di tiga lokasi ini, yakni Hotel Taj Mahal, Oberoi Trident, dan Pusat Komunitas Yahudi di Nariman House. (Jurnal Nasional)

4. Urgency in the air as climate talks commence

The Bali road map will be front and center in Indonesia's approach at the UN climate change conference in Poland this month, as it focuses on securing agreement for medium- and long-term targets for emissions cuts.

The position paper by the Indonesian delegation, led by environment minister Rachmat Witoelar, calls on wealthy nations to take the lead in cutting emissions.

The paper also addresses the importance of defining mechanisms for developing nations to take an active, voluntary role in emissions cuts, with wealthy nations providing financial aid and climate-friendly technology.

"We will push the agenda for a voluntary carbon market, adaptation fund, financial mechanism and technology transfers before 2012," Rachmat said here Saturday.

About 9,000 participants from 185 countries will take part in the annual climate change negotiations, to be held in Poznan from Dec. 1 to 12.

Among those scheduled to attend the conference's opening ceremony on Monday are UN Secretary-General Ban Ki-moon, Polish President Lech Kaczynski, Guyanese President Bharrat Jagdeo, Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt and Tuvaluan Prime Minister Apisai Ielemia.

"The need for real progress on tackling climate change has never been more urgent," Yvo de Boer, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) executive secretary, said in a press statement.

"The effects of climate change that science has identified are already weighing upon those most vulnerable, and who await the financial and technological resources they need to deal with these impacts."

The recommendations from the Poznan conference will be taken to Copenhagen at the end of 2009 and will come into force in 2013, a year after the end of the first commitment, the Kyoto Protocol.

Climate change could have a devastating impact on nearly one billion people living in and depending on forests unless immediate action was taken, researchers from the Bogor-based Center for International Forestry Research (CIFOR) warned.

The warning is made in the CIFOR report *Facing an Uncertain Future: How Forests and People can Adapt to Climate Change*, which will be launched during the Poznan conference.

The report sets out adaptive measures aimed to reduce the vulnerability of forests and forest-dependent communities.

"The first (measure) is to buffer ecosystems against climate-related disturbances like improving fire management to reduce the risk of uncontrolled wildfires or the control of invasive species," said Bruno Locatelli, a CIFOR scientist and lead author of the report.

"The second would help forests to evolve toward new states better suited to the altered climate. In this way we evolve with the changing climate rather than resist it."

WWF Indonesia warned that the Poznan conference should result in concrete actions as the severity of the impacts of climate change increases.

"A massive cut in emissions by rich nations is very urgent," WWF Indonesia climate and energy program director Fitriani Ardiansyah said. (The Jakarta Post)

5. RI-India Teken Empat MoU

Presiden India Pratibha Devisingh Patil hari ini (Senin, 1/12) bertemu Presiden Yudhoyono. Pertemuan tersebut untuk membahas sejumlah hal terkait hubungan bilateral kedua negara, juga berbagai isu regional yang menjadi kepentingan bersama.

Demikian disampaikan Juru Bicara Presiden bidang hubungan luar negeri, Dino Pati Djalal, di Jakarta, Minggu (30/11). Presiden Republik India akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 28 November hingga 3 Desember 2008.

Dikatakan Dino, Presiden Patil baru pertama kali mengunjungi Indonesia setelah kunjungan kenegaraan Presiden Yudhoyono ke New Delhi November 2005 lalu. Pertemuan kedua kepala negara tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama RI dengan India terutama di bidang politik, ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata.

Kedua Kepala Negara, jelas Dino, dijadwalkan menyaksikan penandatanganan empat Nota Kesepahaman (MoU) di bidang kerja sama Pemuda dan Olah Raga, Minyak dan Gas, Pertanian, serta Program Pertukaran Pendidikan. Turut menyertai kunjungan Presiden India adalah 20 orang delegasi resmi ditambah dengan wartawan dan staf pendukung lain.

Indonesia dan India memiliki hubungan sejarah yang panjang, yang dimulai sejak berabad-abad lampau ketika pengaruh budaya dan agama dari India masuk ke bumi Nusantara. Pada tahun 1951, Indonesia dan India menandatangani Perjanjian Persahabatan sebagai langkah awal membina hubungan persahabatan kedua negara dan pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955, India merupakan salah satu negara co-sponsor dari pertemuan yang sangat bersejarah tersebut.

Upaya memelihara dan meningkatkan hubungan baik kedua negara dan bangsa mencatat babak baru melalui kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke India November 2005.

Pada kunjungan tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk New Strategic Partnership (Strategi Kemitraan Baru) guna mempelajari dan mewujudkan potensi kerjasama menjadi realita yang saling menguntungkan. Di bidang ekonomi, nilai investasi India di Indonesia pada tahun 2007 bernilai 96,5 miliar dolar AS pada 44 proyek di berbagai sektor seperti tekstil, otomotif dan jasa.

Dari data Departemen Perdagangan disebutkan, volume perdagangan bilateral tahun 2007 mencapai lebih dari 6,55 miliar dolar AS atau naik dari tahun 2006 yang tercatat sekitar 4,80 miliar dolar AS. Sedangkan volume perdagangan tahun 2008, antara bulan Januari-Juni, dilaporkan sudah mencapai 5,02 miliar dolar AS. Pada tahun 2005, Kepala Pemerintahan kedua negara sepakat menargetkan volume perdagangan ke angka 10 miliar dolar AS pada tahun 2010. (Media Indonesia)

6. Serangan di India: Lashkar e-Taiba Asal Pakistan Dituduh Terlibat Aksi Teror di Mumbai

Serangan teror selama tiga hari di sejumlah tempat strategis di Mumbai berakhir hari Sabtu (29/11). Media massa Israel dan India menuduh Lashkar-e-Taiba yang pernah dibina dinas intelijen Pakistan, terlibat dalam serangan.

Harian Israel Haaretz menurunkan artikel pendek berjudul "Made in Pakistan". Israel menaruh perhatian besar terhadap peristiwa kota Mumbai dengan mengirimkan ahli forensik ke India, salah satunya perwakilan dari Departemen Pertahanan dan agen keamanan Shin Bet. Ada sembilan warga Israel yang tewas dalam serangan ke pusat Yahudi di Mumbai.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, Minggu (30/11), menegaskan akan melakukan apa pun untuk melindungi lembaga Yahudi di Mumbai. Israel sedang bertindak dan akan terus melanjutkan, di mana saja, dengan cara apa saja untuk melindungi pusat-pusat Yahudi.

Pada umumnya Yahudi India tiba di India 1.000 tahun lalu dan tidak pernah menjadi sasaran serangan militan. "Muslim tidak pernah menyakiti kami," kata Solomon Sopher, Ketua Sinagoga Keneseth Eliyahu, dekat dengan pusat Yahudi di Mumbai yang jadi salah satu sasaran militan.

Jumlah keturunan Yahudi di India sekitar 5.000, turun dari 30.000 pada 1940. Hampir semua Yahudi Bani Israel itu tinggal di sekitar Mumbai dan makmur pada masa penjajahan Inggris.

Pejabat dan media India menyebut kapal cepat yang digunakan militan itu merupakan indikasi bahwa penyerang datang dari kota Karachi, Pakistan.

Analisis independen lebih percaya kapal yang digunakan para penyerang bisa datang dari wilayah India lainnya, apalagi penyerang itu menamakan diri Deccan Mujahidin (Mujahidin Selatan). Bisa jadi penyerang berasal dari kota Hyderabad, India Selatan, dengan motif serangan adalah membalas ketidakadilan yang dialami Muslim India. Seorang warga Israel yang disandera di Chabad (pusat kebudayaan Yahudi di kota Mumbai), berhasil mengontak Kedutaan Israel di

New Delhi. Dia menginformasikan tuntutan para teroris tersebut, yaitu meminta pemerintah India membebaskan semua teman mereka yang disekap di penjara India.

Teka teki pun muncul. Kolumnis harian Asharq al Awsat, Abdel Rahman Ar Rashid mengatakan, pelaku serangan di lapangan bisa dari warga setempat dari Muslim atau campuran Hindu-Muslim, tetapi arsitek dan pendanaan serangan yang rapi dan profesional datang dari luar.

Menurut Ar Rashid, belum tentu seorang pelaku serangan di lapangan bernama Muhammad Ajmal Qassam yang berhasil ditangkap pasukan India, mengetahui otak serangan karena skenarionya anak buah tidak mengenal bos untuk mengantisipasi ada anak buah yang ditangkap.

Mendukung Kashmir

Lashkar-e-Taiba adalah pihak tertuduh. Lashkar-e-Taiba merupakan kelompok militan paling aktif di Asia Selatan. Kelahirannya bertujuan melawan pendudukan India di Kashmir. Hampir semua aksi kekerasan di India, didalangi Lashkar-e-Taiba, yang didirikan di wilayah Kunar, Afganistan.

Kelompok ini dirancang sebagai sayap militer Pusat Dakwah dan Petunjuk di Pakistan. Komandan Lashkar-e-Taiba adalah Hafid Muhammad Said yang pernah bekerja sebagai guru besar pada Universitas Punjab, Pakistan. Ia kini memimpin lembaga Islam penyalur santunan. Lembaga ini disinyalir memasok dana operasi Lashkar-e-Taiba di India.

Rapat tahunan yang digelar Lembaga Dakwah tersebut, sering memperdengarkan yel-yel "Jihad". Lashkar a-Tayeb memperkenalkan doktrin "Mengapa Kita Berjihad". Doktrin itu mengandung seruan untuk pengembalian hukum Islam di Asia Selatan, Rusia, hingga Cina.

Doktrin itu menyerukan semua negara berpenduduk Muslim di sekitar Pakistan untuk bersatu. Lashkar-e-Taiba mengklaim membantu Taliban dan Al Qaeda melawan pasukan multinasional pimpinan AS di Afganistan.

Lashkar-e-Taiba mengumpulkan dana dari imigran Pakistan di Teluk, Inggris, Pakistan, dan Kashmir dan juga membentuk pusat pertolongan kemanusiaan.

Dinas intelijen Pakistan membiarkan pusat-pusat latihan itu. Pada Januari 2002, mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf melarang Lashkar-e-Taiba dan empat kelompok Islam radikal lainnya, atas desakan AS.

Sukses operasi Lashkar-e-Taiba tercatat pada tahun 1993, ketika bersama 12 sukarelawan Pakistan dan Afganistan berhasil menyusup dari wilayah Kashmir Pakistan ke Kashmir India.

Tidak seperti kelompok perlawanan Kashmir lainnya, sebagian besar anggota Lashkar-e-Taiba berasal dari non-Kashmir dan berkantor resmi di Pakistan.

Para pemuda Pakistan biasanya berduyun-duyun menuju kamp Lashkar-e-Taiba di Kashmir Pakistan untuk mendapatkan latihan militer, sebelum menyusup ke wilayah Kashmir India.

Laskar ini cenderung berjuang sendiri, tanpa koordinasi atau bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan Kashmir lainnya yang dikenal dengan nama "Majelis Jihad Bersatu".

Semula Lashkar-e-Taiba kurang diperhitungkan oleh kelompok perlawanan Kashmir lainnya, tetapi kemudian mendapatkan penghormatan besar setelah berhasil membentuk "Pasukan Bunuh Diri" untuk melancarkan serangan terhadap pasukan India.

Pascalarangan yang dicanangkan Presiden Musharraf, Lashkar-e-Taiba mengganti nama dengan "Lembaga Dakwah". Pemerintah Pakistan tidak membubarkan Lembaga Dakwah meski diketahui antara Lembaga Dakwah dan Lashkar-e-Taiba ada hubungan erat. Pemerintah Pakistan hanya membatasi gerak gerik pimpinan dan anggota Lembaga Dakwah.

Pusat Dakwah dan Petunjuk kini merupakan organisasi induk dari Lashkar-e-Taiba dan mengklaim telah berhasil membenahi kembali organisasi dengan membentuk dua sayap independen.(Kompas)

7. KBRI Bangkok Bentuk Gugus Tugas Perikanan

Upaya pemberantasan pencurian ikan oleh kapal asing (illegal fishing) di perairan Indonesia serta fasilitasi investasi pengusaha Thailand di Indonesia menjadi perhatian besar Kedutaan Besar RI di Bangkok. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah gugus tugas khusus yang bertugas sebagai jembatan bagi pemerintah dan pengusaha Thailand dan Indonesia.

Demikian disampaikan Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand, Drs H Mohammad Hatta MBA, pada peresmian "Task Force on Fishery" atau Gugus Tugas untuk Perikanan, pada pertengahan November lalu, di Kedutaan Besar RI di Bangkok.

"Task force akan bertugas membantu melakukan fungsi monitoring, pengumpulan informasi dan diseminasi informasi bagi pihak Thailand dan Indonesia. Selain itu, task force juga berperan

dalam memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara pemerintah maupun pengusaha kedua negara," kata Dubes Hatta dalam peresmian tersebut.

Pemerintah Indonesia menilai serius permasalahan di bidang perikanan ini. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 30 triliun per tahun.

Acara peresmian itu dihadiri oleh Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Dr Aji Sularso, anggota Komisi IV DPR-RI yang membidangi masalah perikanan, Direktur dari urusan Asia Timur Kemlu Thailand, wakil dari Dirjen Perikanan, Departemen Pertanian Thailand, BKPM Thailand serta Asosiasi Pengusaha Perikanan Thailand.

Pada acara dialog perikanan antara pihak Indonesia dan Thailand sebagai bagian acara peresmian tersebut, Dr Aji Sularso mengemukakan bahwa peranan task force cukup vital dan merupakan jembatan emas (golden bridge) baik pada level pemerintah maupun pengusaha Thailand dan Indonesia dalam meningkatkan kerja sama di bidang perikanan.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Aji Sularso juga menjelaskan kepada forum dialog tentang kebijakan baru pemerintah Indonesia di bidang perikanan yang berupaya mendorong pihak asing untuk melakukan investasi di Indonesia.

Wakil pemerintah Thailand yang hadir pada acara dialog itu menyambut positif pembentukan task force. Pemerintah Thailand menyatakan bahwa pengusaha Thailand sesungguhnya ingin berinvestasi di Indonesia. Oleh sebab itu, para pengusaha Thailand perlu diberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kesempatan investasi di Indonesia, khususnya setelah pemberlakuan kebijakan perikanan yang baru.

Gugus tugas yang beranggotakan unsur-unsur fungsi dan atase KBRI Bangkok dan Konsulat RI Songkhla tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, khususnya untuk mendorong peningkatan industri perikanan nasional melalui fasilitasi pengusaha Thailand yang akan melakukan investasi di sektor perikanan Indonesia.

Masalah pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia menjadi masalah yang sangat serius yang perlu ditangani oleh Indonesia. Menurut catatan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), kerugian akibat penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Wilayah-wilayah laut Indonesia yang menjadi sasaran pencurian ikan antara lain Laut Arafuru (hot spot), Natuna, Halmahera, dan Laut Sulawesi. Pelaku pencurian ikan biasanya berasal dari negara Thailand, Malaysia, Cina, Taiwan, Filipina dan Vietnam.

Indonesia sempat mengadakan pertemuan di Bali pada Maret 2008 sebagai pertemuan lanjutan SOM di Bangkok pada 2007 mengenai kerja sama regional pemberantasan pencurian ikan. Pertemuan ini diikuti 11 negara, antara lain Australia, Brunei Darusalam, Kamboja, Filipina, Malaysia, PNG, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Indonesia dinilai perlu menegakkan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, meningkatkan potensi ekspor hasil laut ke pasar Cina, investasi pelabuhan perikanan di pesisir Indonesia dan upaya lainnya.

Selain itu, Indonesia menilai perlu sertifikasi ikan hasil tangkapan dan yang dijual di Asia Pasifik, rehabilitasi atas kerusakan lingkungan (biota laut, dll) oleh pencurian ikan serta mempertimbangkan usul DKP untuk menembak kapal ikan yang melarikan diri. (Suara Karya)

I I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Presiden Imbau Rakyat Gunakan Hak Pilih

Komisi Pemilihan Umum Daerah harus menyelenggarakan pemilu dengan teliti, akuntabel, transparan dan obyektif.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau masyarakat Bogor dan seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.

"Saya mengajak masyarakat Kabupaten Bogor dan pada prinsipnya seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada saat kegiatan pemilihan umum dilaksanakan, termasuk Insya Allah pada rangkaian pemilu 2009," kata SBY kemarin (30/11).

Seruan itu ia sampaikan usai memberikan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bogor di Tempat Pemungutan Suara 03 Perkebunan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor. Presiden dan Ibu Ani SBY menjadi pemilih tambahan di tempat itu karena domisilinya di Cikeas, Bogor.

Menurut SBY, penggunaan hak pilih penting agar pada periode lima tahun mendatang terpilih calon-calon pemimpin yang dianggap tepat oleh pandangan atau pendapat orang-seorang sehingga tidak ada kata-kata kurang puas. "Lebih baik memilih sehingga tidak ada ganjalan apa pun nanti pada saat bupati dan wakil bupati terpilih menjalankan tugasnya," katanya.

Presiden mengemukakan, dirinya dan istri sebagai warga negara yang ingin menyukkseskan kehidupan demokrasi di negeri ini, telah menggunakan hak pilih dalam berbagai pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Barat. Dari pemilihan kepala desa di Cikeas, pilkada gubernur Jawa Barat dan pilkada bupati bogor putaran satu dan putaran kedua.

Pemilu Aman

Presiden mengharapkan pelaksanaan pilkada bupati Bogor putaran kedua dilakukan dengan aman, tertib, lancar, dan demokratis. Ia mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menyelenggarakan pemilu dengan teliti, akuntabel, transparan dan obyektif. KPUD juga harus mengambil pelajaran dan pengalaman dari berbagai pilkada di Tanah Air sehingga hasil penghitungan suara dapat dipertanggungjawabkan.

Bila ada pihak yang merasa kurang puas terhadap hasil penghitungan suara, Presiden mengimbau untuk menghindari kekerasan dan memilih jalur hukum sebagai penyelesaian.

"Cegah benturan, kekerasan, main hakim sendiri, dan aksi sepihak! Itu akan merugikan demokrasi, membuat cacat sistem politik dan pada hakikatnya akan membawa persoalan dan masalah pada kehidupan masyarakat kita."

Presiden mengingatkan siapa pun yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati harus mempertanggungjawabkan dan melaksanakan amanah dan keinginan rakyat sebaik-baiknya. Pihak yang menang harus menghormati calon bupati dan wakil bupati yang belum berhasil. Sebaliknya, pasangan yang kalah diharapkan bisa menerima dan menghormati pasangan yang menang.

"Kekalahan bisa menjadi kemenangan yang tertunda. Oleh karena itu wajar dalam pemilihan umum, pilkada, demokrasi, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil," kata SBY. "Karena itu, terimalah dengan ikhlas apa pun hasil yang diraih sesuai dengan pilihan rakyat."

Setelah pemilu, menurut dia, seluruh masyarakat harus mendukung pasangan terpilih. Para pemimpin yang terpilih hendaknya tidak memberikan perlakuan berbeda kepada masyarakat yang tidak memilih mereka. "Tidak boleh membedakan. Itulah indahnya demokrasi," katanya.

Pemilihan bupati dan wakil bupati Bogor putaran kedua diikuti dua pasangan, yakni Fitri Putra Nugraha dan RH Endang Kosasih yang diusung Partai Golkar serta pasangan Rachmat Yasin dan Karyawan Fathurachman yang diusung PPP, PDIP, Partai Pelopor, PNBK, Partai Patriot Pancasila, dan PSI. (Jurnal Nasional)

B. EKONOMI

:

1. KRISIS KEUANGAN GLOBAL Indonesia Terkena Dampak Terbesar

Indonesia adalah negara yang paling terkena dampak terbesar akibat tsunami ekonomi yang melanda dunia saat ini setelah Meksiko.

Kondisi ini tidak adil, bila negara seperti Indonesia dan Meksiko yang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen tiba-tiba harus mengalami dampak serius akibat filosofi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang berprinsip pada mekanise pasar. Demikian disampaikan Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Hatta Rajasa saat mengukuhkan pengurus ICMI Organisasi Wilayah Banten periode 2007-2012 di Serang, Sabtu (29/11). Duduk sebagai ketua ICMI Organisasi Wilayah Banten mantan Dirut PT Krakatau Steel H Daenulhay serta sekitar 160 pengurus lainnya.

Menurut Hatta Rajasa yang juga Menteri Sekretaris Negara ini, ada enam poin yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tsunami ekonomi ini. Yang pertama terkait dengan fenomena khas globalisasi, bio politik, tantangan, dan kecenderungan global. Kedua tantangan pembangunan ekonomi nasional, ketiga krisis keuangan global, keempat modalitas bangsa

menghadapi pembangunan global, kelima rekonstruksi modal sosial untuk menghadapi tantangan global serta keenam terkait pesan dan harapan apa yang bisa kita persembahkan pada bangsa dan negara. Globalisasi sendiri selalu membawa dua aspek penting, yang pertama peluang dan yang kedua bencana atas sebuah tantangan. "Suka atau tidak suka negara kita akan terintegrasi dalam sistem global. Namun yang penting bagi bangsa ini adalah bagaimana kita memperkuat kemandirian sebagai bangsa dan mengurangi dampak buruk dari globalisasi," ujarnya.

Globalisasi, lanjut Hatta, sebenarnya membawa peluang yang baik, meski juga tetap membawa ancaman buruk. "Kita merasakan globalisasi itu juga pada sisi-sisi negatifnya," tuturnya.

Untuk itu, bangsa Indonesia memperkenalkan tatanan ekonomi syariah.

"Menurut saya, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan satu promosi dan terdepan, sehingga banyak orang akan melihat bahwa sistem ekonomi syariah jauh lebih berkeadilan dibanding pasar bebas. Sayangnya memang ini belum banyak kita promosikan di dunia. Padahal di Asia Timur sudah mulai dan Indonesia diyakini sebagai pasar keuangan ekonomi syariah terbesar di dunia," katanya.(Suara Karya)

2. Indonesia Ajak Dunia Tinjau Konsensus Monterey

Krisis keuangan yang melanda dunia menyebabkan aliran dana di berbagai belahan dunia menjadi macet. Terutama aliran dari sektor swasta benar-benar berhenti.

Hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi pembangunan di negara berkembang. Pasalnya, aliran dana dari swasta sudah mendominasi pembangunan di berbagai negara di belahan dunia.

Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta saat berbicara dalam Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan di Qatar, Minggu (30/11), mengatakan bahwa negara maju atau yang memiliki kelebihan dana menjadi tumpuan adanya aliran dana bagi pembangunan di negara berkembang.

"Dalam menghadapi ketidakstabilan global yang semakin meningkat maka peninjauan kembali dari Konsensus Monterey mengenai pembiayaan pembangunan harus dapat memberi sumbangan kepada upaya penguatan sistem keuangan dan ekonomi kita pada tingkat global dan nasional, kata Paskah.

Hal ini akan dapat menciptakan fondasi yang kukuh untuk dapat memobilisasi pembiayaan bagi pembangunan. Negara berkembang sangat tergantung bagi bantuan pembangunan dari negara maju (ODA) dan Foreign Direct Investment (FDI). Dalam hal ini, ODA dan FDI harus dianggap sebagai sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedang membangun.

Negara berkembang, lanjutnya, merasa bersyukur bahwa telah terjadi peningkatan secara riil dalam jumlah ODA sejak Konsensus Monterey. "Kami mengharapkan agar krisis global saat ini tidak akan menghambat terus mengalirnya dana ODA ini. Oleh karena itu, kami sangat menyetujui atas akan dibuatnya jadwal waktu oleh negara-negara donor agar tetap dapat memenuhi komitmen mereka pada penyaluran ODA mereka sebesar 0,7% dari GNP," ujarnya.

Indonesia memandang perlunya upaya memperkuat kemitraan global tentang pembiayaan pembangunan. Banyak dari negara-negara yang sedang berkembang telah melaksanakan langkah-langkah reformasi, sering atas nasehat lembaga internasional, agar dapat meningkatkan kemampuannya untuk memobilisasi sumber pembiayaannya. Namun dengan adanya krisis seperti sekarang ini maka mereka sekarang mengalami kesulitan.

"Perlu adanya kemitraan global yang diperbarui agar dapat menciptakan suatu lingkungan yang kondusif yang dapat mempermudah mobilisasi dana dalam negeri dan internasional secara berkelanjutan, meingkatkan kerja sama finansial dan teknis internasional, dan sekaligus menangani masalah utang luar negeri dan hambatan-hambatan sistemik," urai Paskah yang menjadi pimpinan delegasi Indonesia.

Tanpa adanya upaya-upaya ini maka lingkungan internasional tidak mungkin dapat menghasilkan dana pembangunan.(Media Indonesia)

3. PRODUK WARISAN BUDAYA Meski Krisis, Ekspor Kerajinan Meningkat

Pemintaan ekspor produk kerajinan berbasis budaya, khususnya yang berkualitas tinggi, tidak mengalami penurunan.

Saat ini permintaan di pasar ekspor utama produk tersebut, seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, bahkan mengalami peningkatan penjualan. "Saya perkirakan, ekspor produk kerajinan

berbasis budaya akan mampu bertahan menghadapi dampak krisis global," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel, di Jakarta, Minggu (30/11).

Saat kunjungan kerjanya ke sentra industri kerajinan di Yogyakarta, industri berbasis budaya dan berkualitas tinggi yang mengincar segmen pasar premium (kelas atas) mampu meningkatkan penjualan di tengah melemahnya ekonomi dunia. "Pada sejumlah industri kerajinan, seperti produk mebel yang berstandar eco-labeling (ramah lingkungan) dan mengincar segmen premium, ekspornya tidak banyak terpengaruh krisis, bahkan mengalami peningkatan penjualan. Hal ini membuktikan kalau kalangan industri harus lebih jeli menentukan produksi dan memilih target pasar. Jadi, permintaan ekspor masih cukup tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Rachmat menilai industri kreatif berbasis budaya yang mengincar pasar premium bisa menjadi salah satu strategi Indonesia untuk mempertahankan kinerja ekspor. Ini juga sekaligus guna menekan dampak krisis global terhadap perekonomian nasional secara menyeluruh. "Ini kelebihan dari industri kreatif berbasis budaya. Bisa dibayangkan apabila lebih banyak lagi dunia usaha yang mengembangkan sektor ini. Keuntungan akan berganda. Selain terjadi pendalaman struktur industri, akan tercapai pula ketahanan ekonomi nasional yang mampu meredam krisis global," tutur Rachmat.

Apalagi, industri berbasis budaya merupakan potensi orisinal yang dimiliki industri nasional. Produk seperti ini biasanya bisa menciptakan pasar sendiri, baik dari segmennya maupun wilayahnya. Apalagi, produk yang dihasilkan merupakan barang-barang premium yang harganya juga bagus. "Karena itu, industri kerajinan harus mulai meningkatkan daya saing produknya dengan sertifikasi standar dunia, sehingga produknya bisa lebih mudah dijual ke negara mana pun," ucapnya.

Untuk itu, Rachmat berharap pemerintah memberikan dukungan secara konkret dan berfokus untuk membantu menghilangkan hambatan dalam pengembangan sektor industri kreatif berbasis budaya. Apalagi, segmen pasarnya di kelas premium yang tidak terlalu terkena dampak krisis. Namun, di sisi lain, kalangan pengusaha diharapkan bisa mengembangkan kreativitas dan kualitas produksi, sehingga bisa mencapai standar dunia dan ramah lingkungan serta terus menciptakan pasar potensial yang baru.

Ide Kreatif

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono menambahkan, tidak semua pasar di AS dan Eropa mengurangi pesanan produk mebel dan kerajinan dari Indonesia. Memang permintaan untuk produk yang dibuat secara massal (mass production) terjadi penurunan sangat signifikan. Namun, bagi produk-produk premium, permintaannya tetap ada. "Pasar produk premium menuntut produk yang spesifik. Ini tergantung pada kreativitas industri yang memiliki kelebihan lain, seperti budaya, sehingga memiliki daya saing," katanya.

Menurut dia, modal utama dalam industri kreatif itu adalah ide dan kejelian melihat peluang pasar. Kelebihan industri kerajinan dan mebel berbasis budaya maupun kreativitas adalah bisa menggunakan berbagai macam bahan baku. (Suara Karya)

4. Indonesia Butuh Investor Jangka Panjang

Penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat dampak krisis keuangan global dalam kurun sebelas bulan terakhir, ternyata cukup parah.

Ini bisa dilihat dari data yang disajikan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany dalam presentasinya di forum Investor Summit & Capital Market Expo 2008 di Jakarta pekan lalu. Data tersebut menunjukkan pada akhir Desember 2007, IHSG berada pada level 2.745,88.

Namun pada 25 November 2008, nilai itu menyusut 57,97% menjadi 1.154,14. Jika dibandingkan dengan negara regional lain (10 negara) pada kurun waktu yang sama, penurunan yang dialami BEI merupakan ketiga terbesar setelah bursa Shanghai yang turun 64,10% dan Shenzhen yang terkoreksi 63,26% (lihat tabel) Penurunan IHSG ini tidak bisa dielakkan mengingat krisis finansial global yang begitu dahsyat.

Meski begitu, penurunan yang cukup tajam sebenarnya bisa dihindari andai saja karakter pelaku atau investor di Indonesia lebih dingin menanggapi situasi krisis. Investor semestinya bersikap lebih rasional, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sentimen pasar.

Menurut Fuad, sebagian besar pelaku pasar di Indonesia masih memiliki karakter bermain pendek, baik investor asing maupun investor lokal. Akibatnya, ketika terjadi penurunan yang

tajam, mereka sangat sensitif dan mudah panik. Yang terjadi, akhirnya aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan diikuti sebagian investor domestik.

Investor jangka pendek inilah yang berpengaruh besar terhadap terpuruknya IHSG. Melihat gejala seperti itu, Indonesia membutuhkan investor yang berkarakter jangka panjang. Investor tipe seperti ini lebih kebal dalam menghadapi berbagai gejolak pasar. Mereka sangat mengandalkan kondisi fundamental.

"Kita butuh investor jangka panjang, kita butuh dana-dana jangka panjang karena investor jangka pendek sangat rentan sekali," tuturnya. Untungnya, pada saat yang hampir bersamaan, tingkat kematangan investor domestik sudah lebih baik. Saat investor asing mulai keluar pasar, investor domestik jangka panjang ini menjadi penyelamat.

Hanya sebagian kecil investor lokal yang mencairkan dananya. Salah satu faktor penyelamat mengapa indeks BEI tidak hancur adalah adanya dana-dana yang bersifat jangka panjang. Andai saja Indonesia tidak memiliki dana jangka panjang semacam reksa dana, dana pensiun, asuransi dan lainnya, bisa jadi indeks meluncur terus hingga di bawah 1.000.

Reksa Dana Bertahan

Salah satu indikasi cukup matangnya investor jangka panjang, menurut Fuad, bisa dilihat dari perkembangan yang terjadi di industri reksa dana. "Tidak ada redemption dalam nilai yang signifikan," ungkapnya. Dana yang keluar dari reksa dana terbilang kecil, hanya sekitar Rp3 triliun.

Nilai redemption ini jauh sekali dibandingkan dengan yang terjadi pada 2004 dan 2005 lalu. Saat itu, nilai kekayaan bersih reksa dana anjlok dari sekitar Rp100 triliun menjadi hanya Rp40-an triliun. Ini membuktikan investor pemegang unit reksa dana juga cukup matang. Mereka tidak berbondong-bondong mencairkan dananya.

Masyarakat investor reksa dana tidak perlu takut terhadap nasib investasinya. Sebab, saat ini di Indonesia sudah banyak manajer investasi yang bagus. "Mereka mengelola dana masyarakat dengan hati-hati dan profesional," kata Fuad. Johnny, seorang investor reksa dana, mengatakan tidak mungkin melakukan redemption ketika pasar sudah terkoreksi sangat tajam. "Kalau melepas sekarang percuma, dapat apa kita. Rugi besar. Kalau mau keluar, ya dari dulu waktu indeks masih 2.300." (Koran Sindo)

C. SOSBUD

1. Depag dan DPR Atasi Krisis Transportasi Haji

Departemen Agama dan Komisi VIII DPR akhirnya menyepakati beberapa langkah penanggulangan krisis transportasi haji 2008 dengan cara penempatan fasilitas bus pada setiap kloter dan penyediaan bus untuk menyisir jemaah haji yang terlantar di Masjidil Haram secara terjadwal mulai hari Minggu.

Selain itu, juga terdapat fakta bahwa pondokan jemaah haji Indonesia tahun 2008 tersebar di lokasi-lokasi yang jauh dari Masjidil Haram, demikian kesimpulan Rapat Koordinasi Pemerintah dan Komisi VIII yang berlangsung di Jeddah Sabtu 29 November.

Rakor dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Azrul Azwar yang didampingi 14 anggota DPR lainnya bersama Dirjen Urusan Haji Slamet Riyanto, Sekjen Depag Bahrul Hayat, Konjen Jeddah Gatot Abdullah Mansyur, dan Kepala Teknis Urusan Haji (TUH) Nur Somad Kamba.

Rapat menegaskan perlunya respon cepat tanggap Pemerintah terhadap berbagai keluhan teknis yang dihadapi jemaah haji hingga akhir pelaksanaan haji 2008, terutama saat pelaksanaan puncak haji di Arafah dan Mina yang akan berlangsung tanggal 8 s/d 10 Desember.

Pelaksanaan Haji 2008 mengalami berbagai permasalahan teknis yang disebabkan oleh tersebarnya pemondokan jemaah di berbagai lokasi yang jauh dari Masjidil Haram, sebagai akibat melangitnya harga sewa pondokan di sekitar Masjidil Haram di atas pagu biaya pondokan yang disetujui DPR sebesar maksimum 2000 Real per orang.

Dengan pagu anggaran tersebut, TUH Depag di Jeddah, sebagai pelaksana teknis pelayanan haji Pemerintah mengalami kendala dalam memperoleh pondokan di sekitar Masjidil Haram, pada saat harga sewa melangit menembus 3000 Real per orang.

Berbagai keluhan jemaah akibat transportasi menjadi keluhan sehari-hari, selain minimnya fasilitas air di berbagai lokasi pemondokan.

Salah seorang jemaah dari Sidoarjo, Jatim, Riyono Asnan yang tinggal di rumah 821 menyatakan jauhnya lokasi pemondokan masih bisa dimengerti sepanjang dukungan fasilitas transportasi dan ketersediaan air dapat dipenuhi.

Sebagai pengawas Haji 2008, anggota Komisi VIII DPR, Abdullah Azwar Anas yang langsung melakukan pengawasan di lapangan memastikan akan melakukan pengawasan harian terhadap hasil-hasil keputusan Rapat Koordinasi yang berlangsung pada hari Sabtu (29/11) agar dilaksanakan dengan konsekuen oleh Pemerintah. (Media Indonesia)

D. HANKAM

:

1. KRISIS GLOBAL TNI AL Perketat Pengamanan Selat Malaka

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda Soeparno mengatakan, jajarannya memperketat pengamanan Selat Malaka terkait dengan perkembangan krisis ekonomi global akhir-akhir ini.

Naiknya eskalasi dampak krisis ekonomi global dikawatirkan akan semakin ramai dengan penyelundupan dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya.

"Untuk itu TNI AL melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti bea cukai dan kepolisian semakin diintensifkan," kata Pangarmabar Laksda Soeparno usai memberangkatkan peserta Lomba Memancing Piala Panglima Armabar 2008, di Pantai Marina, Ancol, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, Selat Malaka merupakan jalur laut strategis dunia. Setidaknya, 20 persen lalu lintas angkutan laut komersial dunia, 33 persen angkutan minyak dunia, 37 persen angkutan semikonduktor dunia dan 57 persen kapasitas pelayaran dunia melewati Selat Malaka.

Karena Selat Malaka sepanjang 500 mil atau 926 kilometer itu membentang dari Pulau Rondo (perbatasan Indonsia dan India) hingga Pukhet (Thailand) melewati beberapa negara pantai, maka menurut Pangarmabar, dibentuk kerja sama dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Dalam kerja sama ini dibentuk patroli bersama yang disebut Patroli Koordinasi Malaysia-Singapura-Indonesia (Patkor Malsindo).

Sejak dua bulan yang lalu, Angkatan Laut Thailand ikut bergabung dalam kegiatan patroli tersebut guna menambah kekuatan. "Koordinasi patroli empat negara ini ternyata dapat menekan tindak kejahatan di selat tersebut," kata Pangarmabar.

Menurut Pangarmabar, dengan adanya peningkatan kerja sama patroli tersebut, dalam tahun ini tidak lebih dari 10 kali tindak penyelundupan di wilayah itu.

"Semua pelaku penyelundupan tersebut berhasil ditangkap. Bahkan dalam tahun 2007 sama sekali tidak terjadi kasus penyelundupan," ujarnya.

Dia mengatakan, melalui patroli bersama ini dibangun beberapa titik pengawasan, antara lain di Belawan dan Batam (Indonesia), Lumut (Malaysia) dan Changi (Singapura). Dengan bergabungnya Thailand dalam kegiatan patroli bersama ini, direncanakan akan dibangun titik pengawasan di Pukhet (Thailand).

Perompakan

Sementara itu, terkait dengan masalah pengamanan di Selat Malaka, di tempat terpisah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Marsekal Muda Sagom Tambun memprediksikan bahwa dengan krisis ekonomi global, maka diperkirakan Selat Malaka akan semakin ramai dengan kegiatan perompakan dan penyelundupan atau kegiatan ilegal lainnya.

"Untuk itu, seperti yang telah dilaksanakan koordinasi keamanan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand, maka kegiatan (koordinasi patroli) ini akan lebih dioptimalkan untuk menghadapi akibat dari krisis ekonomi global ini," kata Kapuspen.

Menurut dia, peningkatan kerja sama pengamanan Selat Malaka itu telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Lomba memancing memperebutkan Piala Panglima Armabar 2008 tersebut diikuti 34 klub dengan menggunakan 34 kapal motor. Perlombaan yang dilaksanakan di perairan laut sekitar Kepulauan Seribu itu ternyata menghasilkan ikan-ikan yang cukup besar. Tampil sebagai juara pertama pemancing Paulus dari klub Samuel yang berhasil memancing ikan krapu seberat 16,35 kilogram, juara II Jefry dari klub PFC Tangerang memancing tengiri seberat 16,2 kg.(Suara Karya)

E. HUKUM

:

1. KPK Dipersilakan Tangani Kasus Indover

Kejaksaan Agung mengaku kesulitan menyeret kasus Bank Indover ke pengadilan.

KEJAKSAAN Agung belum juga menetapkan sikap, akankah bisa melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi senilai hampir US\$1 miliar di NV De Indonesische Overzeese Bank (Bank Indover). Akibatnya, seperti dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), banyak kalangan yang mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi di anak perusahaan BI yang pusat operasinya di Belanda ini.

Akhirnya, 25 November lalu Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, komisi pimpinan Antasari Azhar itu akan mempelajari kasus tersebut terlebih dulu, sebelum melakukan supervisi. Kejaksaan Agung pun mempersilakan KPK untuk mengambil alih kasus Bank Indover.

"Silakan saja. KPK *kan* berwenang mengambil alih kasus ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan, saat Sarasehan Kejagung di Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/11).

Namun Jasman mengingatkan, ada mekanisme yang harus dipenuhi dalam pengambilalihan kasus Bank Indover. "Perlu diingat, tugas utama KPK (dalam kasus ini) bukan menyidik, melainkan supervisi dan koordinasi. KPK harusnya fokus pada dua hal itu."

Dia menjelaskan, keterlibatan KPK dalam kasus Bank Indover ini untuk memacu proses penyidikan. Dalam pelaksanaannya, KPK tetap harus memerhatikan tugas utamanya itu.

Jasman mengatakan, mekanisme yang dia maksudkan adalah, ditemukannya ada yang salah dalam proses penanganan ini oleh pihak Kejagung. Atas dasar itu, barulah kemudian KPK bisa mengambil alih.

"Yang pasti kami tetap memberi dukungan kepada KPK. Apa saja yang mereka butuhkan, tidak ada yang kami tutup-tutupi dan tidak ada pihak-pihak yang kami lindungi. Intinya, sampai saat ini kami masih koordinasi dan mereka (tim Kejagung) masih akan mempelajari kasus ini," kata Jasman.

Kasus dugaan korupsi Bank Indover pernah ditangani Kejagung pada 2001. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar US\$978 juta itu, Kejagung telah menetapkan bekas Direktur Utama Bank Indover di Amsterdam, Belanda Siddharta SP Suryadi dan *Managing Director* Bank Indover di Hong Kong Permadi Gandapraja sebagai tersangka.

Selama ini, Kejagung selalu mengaku kesulitan menyeret kasus Bank Indover ke pengadilan. Alasan yang senantiasa dikemukakan, karena persoalan *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana. Yang menjadi persoalan, pencairan dana bermasalah di Bank Indover, di Belanda bukanlah merupakan tindak pidana korupsi menurut hukum Negeri Kincir Angin tersebut. Yang saat ini dikaji Kejagung, adakah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan di Indonesia, sehingga mengakibatkan proses pencairan uang di Bank Indover itu bisa terjadi. (Jurnal Nasional)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP : Tidak Ada

III. ARTIKEL :

1. Sudikah negara maju kembali ke perdagangan bebas? (oleh : Erna S. U. Girsang)

KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) baru saja berakhir awal pekan lalu di Lima, Peru. Seperti KTT 2 tahun lalu di Sydney, pertemuan kali ini juga membahas kebuntuan perundingan World Trade Organization.

Perbedaannya, kali ini APEC khusus memunculkan komitmen bersama melangkah lebih maju guna melaksanakan perdagangan bebas.

Pertemuan APEC kali ini memang terasa berbeda karena digelar di tengah situasi krisis keuangan global yang mulai mengarah pada resesi.

Komitmen itu cukup mengundang perhatian. Pasalnya, dunia sudah lama meninggalkan perdagangan bebas yang digagas ekonom Inggris Adam Smith pada 1776, melalui *The Wealth of Nations*.

Setidaknya perdagangan bebas tidak lagi sepenuhnya diterapkan, karena sistem itu menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan perdagangan, kecuali terjadi kecurangan.

Dalil Adam itu mulai digeser oleh teori John Maynard Keynes, menyusul terjadinya Great Depression pada 1930. Keynes yang disebut sebagai bapak ekonomi makro menilai

perdagangan tanpa intervensi pemerintah gagal mengatasi krisis. Hasilnya, dunia berhasil keluar dari Great Depression.

Dalam perkembangannya kelompok negara maju menggabungkan dua dalil itu dengan memanfaatkan kekuatan modal, sehingga memunculkan neo liberalisme. Batasannya sangat fleksibel, tergantung keuntungan, tanpa memikirkan kerugian kompetitor.

Akibatnya neoliberalisme beraksi tanpa batasan, tanpa memedulikan protes dan keluh kesah emergencing market.

Benarkah perdagangan bebas dapat dilaksanakan pada kondisi saat ini? Pasalnya, tanpa proteksionisme dari negara industri saja, sejumlah negara berkembang lebih dahulu telah menentang perdagangan bebas karena belum siap jika harus bertarung dengan produk negara maju yang lebih menguasai teknologi dan informasi pasar.

Pada pelaksanaannya, perlindungan justru datang dari kelompok negara maju, seperti AS, Eropa, dan Jepang, dengan subsidi produk pertaniannya. Uni Eropa contohnya, pada 2006, sekitar 62% anggarannya digunakan untuk subsidi pertanian.

China berbeda lagi. Negara itu menerapkan kebijakan mata uang tetap (fixed rate currency) pada posisi rendah, sehingga menjamin produk ekspor China di bawah harga internasional.

Biro sensus AS menyebutkan China menguasai 21,3% pasar ekspor dunia, dan menjadi pemasok utama 15 negara pengguna euro.

Apa yang terjadi di negara berkembang. Industri pertanian dan manufaktur sejenis sulit tumbuh, karena tidak mampu bersaing dari sisi harga.

Jangankan ekspor, pasar dalam negeri saja sulit diraih.

Belum berhasil

Apa upaya untuk mengatasinya? Sejauh ini hampir tidak ada upaya signifikan, selain protes di WTO yang sejauh ini belum menghasilkan kesepakatan signifikan.

Kenapa tidak menerapkan subsidi yang sama? Tidak semudah itu, karena setelah menyubsidi produk pertaniannya, negara maju mengintervensi negara berkembang dengan kekuatan modal perusahaan transnasional dan melalui lembaga dana internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan Japan Bank for International Cooperation.

Larangan subsidi menjadi persyaratan memperoleh pinjaman dari lembaga dana internasional.

Sebagai gambaran kekuatan modal AS. Total sumber dana IMF dari kuota sampai akhir Agustus 2008 mencapai US\$341 miliar. AS pemilik kuota terbesar, yaitu US\$58,2 miliar. Semakin besar kuota anggota, semakin besar kekuatannya menetapkan keputusan di IMF.

Jika AS, Jepang dan anggota Uni Eropa mengintervensi negara berkembang dari lembaga keuangan multilateralnya, China memperkuat posisi tawarnya dengan cadangan devisa yang telah melebihi US\$1,9 triliun.

Nah, bersedialah negara maju menyingkirkan kekuatannya itu demi sebuah perdagangan bebas?

Perundingan tetaplah perundingan. Harus ada penawaran yang diajukan untuk memenangkan sebuah negosiasi, bukan sekadar berfilosofis, apalagi bawa-bawa kemiskinan, sudah bukan zamannya.

Apa tawaran negara berkembang untuk membebaskan diskriminasi perdagangan dunia. Kita tunggu saja pertemuan WTO di Jenewa Swiss pada Desember 2008. (Jurnal Nasional)

2. Industri Strategis Indonesia (oleh Cyrilus Harinowo)

JIKA kita melakukan penerbangan jarak pendek dari Boston ke New York atau New York ke Washington DC dan kemudian terus lagi ke Miami, sangat boleh jadi pesawat yang kita tumpangi adalah jet menengah dengan jumlah penumpang sekitar 50 orang.

Pesawat yang sangat populer sebagai "shuttle" antarkota tersebut adalah pesawat Embraer Regional Jet (ERJ) buatan Brasil. Pesawat ini menggantikan pesawat Boeing yang lebih besar sehingga lebih boros bahan bakar. Bahkan pada suatu masa, pesawat ulang-alik tersebut menggunakan Boeing 727 yang bermesin tiga sehingga penggunaan bahan bakarnya menjadi lebih besar lagi.

Embraer Jet memang pada akhirnya merupakan suatu fenomena tersendiri. Pesawat yang dibuat negara berkembang pada akhirnya mampu menembus pasar yang memiliki persaingan sedemikian kuat antara Amerika Serikat dan Eropa.

Suatu hal yang menjadi kuncinya adalah spesifikasi pesawat tersebut yang sangat cocok dengan kebutuhan "shuttle flight" yang frekuensinya demikian tinggi, sehingga sering kali terlalu

kecil jumlah penumpangnya jika ditempatkan pada pesawat yang lebih besar. Namun, kesimpulan yang pasti adalah bahwa hasil industri dari suatu negara berkembang pada akhirnya memperoleh pengakuan dari dunia internasional.

Kapal Induk Helikopter

Hari Jumat pekan yang lalu, saya menyaksikan sebuah kapal induk helikopter. Kapal induk helikopter tersebut memiliki kapasitas helipad sebanyak enam helikopter. Namun, di dalam perutnya mampu untuk menyimpan 10 buah helikopter lagi, sehingga jumlah 16 helikopter yang mampu dibawanya merupakan suatu kekuatan yang tidak kecil bagi sebuah armada.

Kapal tersebut memang baru sebuah model yang dikembangkan PT PAL Surabaya. Namun, perusahaan tersebut demikian percaya diri mampu membangun kapal semacam itu. Kemampuan tersebut terbangun oleh keberhasilan PT PAL dalam memenuhi permintaan pembangunan kapal besar ukuran 50.000 ton yang dipesan berbagai perusahaan pelayaran internasional.

Tahun ini, dua kapal ukuran 50.000 ton tersebut telah diluncurkan, yaitu pada Februari 2008 dengan nama MV *Serpentina*, sedangkan pada Agustus yang lalu, kapal kedua juga diluncurkan dengan nama MV *Saturnus*. Kedua kapal tersebut adalah pesanan perusahaan pelayaran *Space Shipping Limited* dari Turki dan merupakan bagian dari tiga kapal yang mereka pesan.

Sebelum peluncuran untuk perusahaan Turki tersebut, sebuah perusahaan pelayaran Jerman juga memesan kapal dengan ukuran yang sama dan sudah berhasil diluncurkan. Kemampuan PT PAL dalam membangun kapal dengan bobot mati 50.000 ton tersebut merupakan hasil dari evolusi pengembangan kemampuan yang semula dilakukan melalui program *Caraka Jaya*.

Pembangunan kapal di zaman Habibie dengan tonase yang sangat kecil tersebut, ternyata merupakan landasan berpijak yang semakin lama semakin kuat. Dalam beberapa waktu terakhir, PT PAL mampu memenuhi beberapa permintaan dari perusahaan pelayaran dunia dari Jerman, Hong Kong, Italia, Turki, dan Portugal untuk pesanan kapal berbagai jenis dengan ukuran yang bervariasi pula.

Meski demikian, kapal berbobot mati sebesar 50.000 ton tersebut adalah yang terbesar yang mampu dibangun PT PAL dewasa ini, dan di dunia pelayaran populer disebut *Star 50*. (Saya justru agak heran tidak banyak perusahaan pelayaran Indonesia, kecuali PT *Pelni* yang memesan kapal penumpang untuk 500 orang, yang memesan kapal buatan dalam negeri tersebut).

Rasanya tinggal menunggu waktu bagi PT PAL untuk lebih dikenal dunia pelayaran internasional sehingga dapat menembus pasar yang lebih luas lagi. Dalam upaya promosi tersebut, pada akhirnya memang diperlukan suatu terobosan penting yang mampu menjadi trigger bagi mencuatnya nama sebagaimana beberapa perusahaan pembuat kapal Korea yang namanya sangat dikenal di dunia.

Selain terus memasarkan dan mengembangkan produk yang memang sudah teruji, yaitu kapal sekelas *Star 50*, PT PAL mungkin perlu membangun kerja sama yang lebih luas untuk pengembangan kapal dengan kelas yang lebih besar ataupun juga meneruskan "mimpi" membuat kapal induk helikopter tersebut.

Membangun Kemampuan Industri Strategis

Kemampuan industri strategis Indonesia tampaknya semakin berkembang tanpa kita sadari. Dalam pameran *Indo Defence 2008* yang lalu, kemampuan PT *Pindad* akhirnya menjadi diketahui semakin banyak orang. Saya yang awam dengan lika-liku persenjataan, mampu mengagumi panzer maupun armored personnel carrier (APC) yang dibuat perusahaan tersebut.

Produk pesanan dari Departemen Pertahanan Indonesia tersebut memiliki desain dan kekuatan yang patut dibanggakan, yang dikatakan tidak kalah dibandingkan dengan panzer *VAB* buatan Prancis. Kenangan masa kecil yang dengan bangga menyaksikan tank-tank yang dimiliki ABRI kembali lagi muncul menyaksikan panzer dengan senjata kanon yang mampu dibangun industri kita sendiri.

Kemampuan tersebut merupakan ekspansi dari kemampuan pengembangan senjata seperti senapan serbu (*SS2*) yang menjadi senjata organik angkatan bersenjata kita. Senapan yang mampu memenangkan banyak pertandingan menembak tersebut tidaklah perlu minder menghadapi *M-16* ataupun *AK-47* yang sudah sangat dikenal oleh dunia kemiliteran dunia.

Sebagaimana pesawat *ERJ* yang tidak minder berhadapan dengan pesawat *Boeing* ataupun *Airbus*, maka PT *Pindad* perlu terus membangun keahlian di bidang persenjataan tersebut untuk semakin memperkuat pasukan kita.

Departemen Pertahanan juga perlu terus mendukung berkembangnya industri tersebut dengan berbagai pesanan yang memungkinkan mereka berkembang, baik hasil rekayasa sendiri maupun juga dengan lisensi asing. Menyaksikan Indo Defence 2008 tersebut, semakin menguatkan keyakinan kita bahwa di segala mata, darat, laut dan udara, Indonesia ternyata memiliki kemampuan industri yang sungguh tidak main-main.

Bahkan dibandingkan dengan negara di wilayah ini, kemampuan tersebut rasanya akan semakin menonjol jika memperoleh dukungan yang lebih besar, baik dari sisi keuangan tetapi terlebih lagi dari sisi "pengakuan" (recognition). Masa krisis yang dialami saat ini mungkin memberikan masalah bagi beberapa industri strategis, misalnya dari sisi pricing yang terpengaruh oleh naik-turunnya harga-harga bahan baku yang luar biasa.

Secara finansial, hal tersebut jelas menimbulkan permasalahan tersendiri. Meski demikian, krisis ini mungkin justru bisa juga memberikan peluang bagi Departemen Pertahanan serta industri strategisnya untuk lebih mengembangkan diri.

Upaya untuk melakukan penguatan ekonomi domestik bisa juga diartikan secara lebih sempit di sektor ini dengan lebih banyak memberikan kesempatan kerja pada industri strategis kita dengan pesanan-pesanan yang lebih banyak dan beragam sehingga memungkinkan industri strategis kita berkembang lebih cepat lagi.

Dalam meneliti kinerja industri strategis tersebut, kemampuan teknologi yang telah berhasil dibangun, mudah-mudahan menjadi timbangan yang lebih berat dibandingkan dengan kekurangan di bidang lainnya. (Koran Sindo)

3. "Si Kancil" Agen CIA? (oleh Sabam Siagian)

Tulisan Julius Pour, mantan wartawan Harian Kompas yang telah menghasilkan beberapa biografi politik sejumlah tokoh, dalam rubrik "Buku" (Kompas, 23/11, hal 11) dengan judul Membaca Indonesia dari Laporan CIA telah menggelitik perhatian masyarakat.

Tulisan tersebut menyoroti sebuah buku berjudul (di kulit luar) Membongkar Kegagalan CIA - Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya. Di halaman dalam judulnya Kegagalan CIA - Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya (833 hal, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama - Jakarta, 2008).

Terbitan ini adalah terjemahan (alih bahasa oleh Akmal Syamsuddin) dari buku berjudul Legacy of Ashes (Warisan Puing-puing), karya Tim Weiner, wartawan harian terkemuka The New York Times, yang diterbitkan oleh Penguin Group (London - New York 2007), 700 hal dengan Index.

Buku ini menjadi menarik dan habis terjual di beberapa toko buku Gramedia, karena Julius Pour menyoroti bagian tentang peranan almarhum Adam Malik (wartawan, aktivis politik, duta besar, menko pelaksanaan ekonomi terpimpin, Menteri Luar Negeri, Ketua DPR, Wakil Presiden, kolektor keramik kuno Tiongkok, kamera antik, dan lain-lain). Di buku orisinal uraian tentang Bung Adam dapat dibaca di hal 258 s.d 262 (4 hal dari 700 hal) dan di buku terjemahannya di hal 329 s.d 334 (5 hal dari buku setebal 832 hal, tanpa Index).

Penulis Tim Weiner bercerita tentang pertemuan antara Adam Malik dan seorang petugas CIA (Central Intelligence Agency - Badan Intelijen Pusat yang didirikan pada 1947 dengan SK Presiden Harry Truman), Clyde Mc Avoy, "di sebuah tempat rahasia dan aman di Jakarta" (hal 330). McAvoy berpengalaman dalam menghubungi dan membina tokoh-tokoh politik dan pemerintahan tingkat tinggi, seperti pernah dilakukannya di Jepang. Salah seorang "binaan"-nya kemudian menjadi Perdana Menteri Jepang.

Weiner mewawancarai McAvoy pada 2005 melalui telepon. Dengan bangganya, dia berkata tentang pengalamannya 41 tahun (!) sebelumnya: "Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik". (Beberapa terjemahan istilah oleh Akmal Syamsuddin tidak begitu "kena". Umpamanya "CIA Station" yang merupakan sebutan khas, sebaiknya menjadi "kantor perwakilan CIA" dan bukan "Stasiun CIA". Kutipan ini orisinalnya: "I recruited and ran Adam Malik". Kata kerja "to run (ran)" di sini adalah idiom Inggris/AS sebaiknya diterjemahkan "membina" dan bukan "mengontrol" yang menimbulkan citra Bung Adam menjadi sangat negatif. Lagi pula siapa yang mampu "mengontrol" Bung Adam dengan julukan Si Kancil itu?

Dalam hal 258 s.d 262 sebenarnya Weiner menulis hanya sekilas saja tentang hubungan perwakilan CIA dan Kedutaan Besar AS (khususnya Dubes Marshal Green) dengan Adam Malik.

Setelah kabinet pertama purna-Supersemar (11 Maret 1966) terbentuk dengan Presidium Kabinet, 5 tokoh (Ketua Jenderal Soeharto, HB IX, Sanusi Hardjadinata, Idham Khalik, Adam Malik), perwakilan CIA Jakarta dan Kedutaan Besar AS dengan persetujuan atasan mereka di

Washington DC menyalurkan bantuan melalui Adam Malik untuk mengkonsolidasikan organisasi-organisasi pendukung Orde Baru.

Jumlah yang disebut adalah US\$ 10.000, suatu jumlah yang menurut ukuran pada waktu itu juga tidaklah begitu besar, jika diperhitungkan apa yang menjadi pertaruhan pada waktu itu.

Julius Pour dalam tulisan tersebut (Kompas Minggu, 23/11 hal 11) mendesak supaya "dilakukan klarifikasi mutlak agar pembaca tidak ikut-ikutan menebar fitnah". "Klarifikasi mutlak" adalah sesuatu yang mendekati ketidak mungkinan. Namun, klarifikasi awal atau sementara berdasarkan rekonstruksi situasi kondisi politik pada 1964, 1965, dan awal Orde Baru, serta pengenalan tentang tokoh kepribadian Adam Malik dalam konteks historisnya, perlu diusahakan.

Di bawah ini diurutkan beberapa catatan. Pertama, tahun 1964 dan 1965, ketika semakin jelas betapa Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia beraliansi untuk menata ulang RI sebagai negara yang "progresif nasionalis", sedangkan berbagai organisasi dan partai politik sudah dilarang, tokoh-tokoh independen, seperti Adam Malik, yang masih mendambakan Indonesia yang bebas dan aktif, amat resah.

Ia kenal betul Bung Karno dan khawatir melihat pandangan politiknya yang semakin irasional serta naivitasnya dalam menganggap bahwa PKI dapat dia manfaatkan sebagai instrumen pribadi. Bung Adam juga mengenal baik tokoh-tokoh PKI, seperti Aidit dan Nyoto, karena bersama-sama mengikuti kursus-kursus politik di Asrama Pemuda Jakarta selama pendudukan militer Jepang di Jawa (1942-1945).

TNI sebagai satu-satunya organisasi yang independen dan Pancasilais, karena struktur dan hierarki militer, sebenarnya dipaksa bersikap pasif. Presiden Soekarno, yang memaksimalkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dan memakai seragam dengan berbagai bintang jasa yang tidak jelas asal usulnya, berhasil memecah-belah jajaran perwira tinggi AD-TNI. Sementara itu, ekonomi tambah parah dengan inflasi mendekati 600 persen! Penderitaan rakyat di pedesaan semakin berat.

Kedua, dalam situasi kondisi demikian di mana ruang gerak bagi organisasi dan tokoh-tokoh independen semakin sempit, sudah dapat diperkirakan bahwa seorang, seperti Adam Malik membuka setiap saluran yang tersedia yang mungkin dapat mendobrak penyempitan politik di Jakarta, serta keterisolasian RI di dunia internasional. Kalau Bung Adam mengadakan pertemuan dengan petugas CIA di Jakarta pada tahun 1964, mengingat hidupnya sebagai seorang aktivis politik yang selama tahun-tahun Revolusi di Yogyakarta keluar masuk penjara, maka dugaan saya, dia juga mengadakan hubungan dengan agen dinas intel Inggris di Jakarta (MI 6).

Juga hampir dapat dipastikan bahwa sebagai mantan Duta Besar RI di Moskwa, ia mengenal wakil senior KGB (dinas intel Uni Soviet) di Jakarta.

Hubungan ini semakin penting, karena PKI telah menunjukkan indikasi secara ideologis lebih berkiblat ke Beijing ketimbang Moskwa. Sudah logis kalau para agen KGB di Jakarta mengamati gerak-gerik PKI secara cermat bahkan mungkin saja menyusupkan orang-orangnya ke dalam tubuh PKI. Sudah dapat diduga kalau Bung Adam memanfaatkan hubungan dengan pejabat senior KGB di Jakarta untuk mengorek informasi tentang perkembangan intern PKI.

Ketiga, dalam konteks persaingan memperoleh informasi yang paling akurat dan paling komplisit tentang aliansi antara PKI dan Presiden Soekarno, perkembangan intern PKI dan menelusuri kemungkinan memperoleh bantuan untuk kelompok dan tokoh-tokoh independen yang masih mampu menyelamatkan diri, patut kita tempatkan pertemuan antara Adam Malik dengan petugas CIA, Clyde McAvoy (terjemahan "CIA Officer" menjadi "Perwira CIA" tidak begitu tepat) pada tahun 1964. Kedua belah pihak ingin saling mengorek informasi dan menelusuri kemungkinan untuk saling membantu dengan sasaran jangka pendek yang kongkret.

Kalau 41 tahun (!) setelah pertemuan itu McAvoy melalui telepon secara bombastis menyampaikan kepada wartawan Tim Weiner: "Saya yang merekrut dan membina Adam Malik", sungguh diragukan bobot dan kualitas ucapan itu. Weiner sebenarnya harus bertatapan muka, mewawancari McAvoy mengenai sesuatu hal yang secara jurnalistik adalah informasi penting dan peka.

Wawancara melalui telepon memungkinkan seorang narasumber bicara seenaknya dan si wartawan tidak dapat menilai dari wajahnya, apakah dia serius atau ngibul.

Keempat, karena itu, konklusi yang ditulis Weiner (hal 330) bahwa kantor perwakilan CIA di Jakarta "memiliki seorang agen yang punya posisi baik, Adam Malik dan seterusnya", adalah konklusi gegabah dan perlu dianalisis secara teliti kualitasnya.

Kalau yang dimaksud bahwa kantor perwakilan CIA berhasil mempunyai, kasarnya, "Spion Melayu" bayaran yang digaji setiap bulan, maka siapa yang mengenal tokoh kepribadian Bung

Adam sebagai aktivis dan insan politik, akan menilai kualitas konklusi itu rendah sekali. Juga disebut suatu "bantuan besar" sejumlah US\$ 10.000 yang disalurkan melalui salah satu pembantu Bung Adam ke organisasi-organisasi pendukung Orde Baru. Mungkin patut dipertimbangkan bahwa mereka harus menghadapi PKI yang dapat diperkirakan mendapat bantuan dari pendukungnya di luar negeri, dan Presiden Soekarno yang memanfaatkan alat-alat negara yang masih loyal - maka setiap bantuan yang dapat dimanfaatkan perlu segera diterapkan.

Konklusi yang ditulis Weiner bahwa kantor perwakilan CIA di Jakarta "memiliki seorang agen yang berposisi baik, Adam Malik...dan seterusnya" menimbulkan suatu kecurigaan tentang kemungkinan terjadinya korupsi. Untuk memperkuat hasil wawancaranya per telepon itu, Weiner menulis di catatan kaki (hal 765) bahwa - "Peran penting Mc Avoy sebagai perwira (mestinya "pejabat", Ssg) CIA di Indonesia dibenarkan oleh tiga orang rekanya yang ada di Dinas".

Keterangan tambahan ini tidak mendukung konklusinya. Seperti juga dilaporkan Weiner di bagian lain bukunya, kasus-kasus korupsi para pejabat CIA di lapangan, apalagi seorang kepala perwakilan yang biasanya dialokasikan dana operasional cukup besar tanpa harus dipertanggungjawabkan dengan bukti tanda terima, bisa saja terjadi.

Melaporkan bahwa kantor perwakilan memiliki agen lokal dengan posisi baik bisa saja disalahgunakan bahwa si agen telah di bayar X dolar setiap bulan, padahal tidak benar. Dan uang tersebut masuk kantong si pejabat - kemungkinan demikian patut juga dipertimbangkan mengingat di dunia persaingan intelijen di mana hal-hal aneh bisa saja terjadi.

Akhirnya, kunci persoalan terletak dalam penilaian kita tentang sosok kepribadian dan karakter seorang Adam Malik. Mengingat perjuangan politik yang dilakukannya selama kolonialisme Belanda dekade 1930-an, pendudukan militer Jepang (1942-1945), tahun-tahun Revolusi di Yogya, apakah dia tipe seorang "Spion Melayu" yang bersedia menerima bayaran sebagai imbalan atas laporannya.

Para wartawan sering menjuluki Adam Malik sebagai "Si Kancil". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (Edisi Ketiga, Jakarta 2000) ada tiga pengertian diberikan pada kata "Kancil". (1. Binatang pemakan tanaman yang cepat larinya, berbadan langsing, dan seterusnya. 2. Tokoh utama binatang yang cerdik di cerita rakyat di Asia Tenggara. 3. Orang yang cerdik dan licik (banyak akal).

Semua elemen yang disebut dalam tiga pengertian itu: badan langsing, cepat bergerak, cerdik, banyak akal, sekali-sekali licik - semua itu dimiliki Bung Adam. Apakah pernah tersirat di benak para pembaca buku Weiner bahwa sebenarnya Adam Malik-lah yang memanfaatkan CIA demi tujuan perjuangan nasional ?

Dalam buku memoarnya Mengabdikan Republik Jilid III: Angkatan Pembangunan, Adam Malik bercerita tentang pengalaman yang amat berkesan bagi dia, yakni pada saat kunjungannya yang pertama sebagai Wakil Presiden ke daerah Jawa Timur, Juli 1978. Pada spatbord sebuah Colt dekat Songgoriri dia baca tulisan: "Apa yang kau mau, apa yang kau rindu, pasti jadi, asal kau mau".

Malamnya dia renungkan makna kata-kata sederhana itu. Bung Adam menulis: "...(kata-kata itu) menunjukkan sikap mental yang tegas dan dinamis, dan selama masih ada semangat yang menggerakkan tangan untuk mencoretkan gambaran dinamika batin yang bunyinya semacam itu, saya yakin rakyat kita tidak kehilangan arah untuk maju".

Agaknya ungkapan tulus demikian bukanlah kata-kata seorang "spion bayaran" yang tega menjual kepentingan bangsanya.(Suara Pembaruan)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. Waging the war on terror

The attacks in Mumbai last week send a loud and clear message to Indonesia and the rest of the world that when it comes to dealing with terrorism, there is no letting down your guard. The global "war on terror", to use the expression first coined by U.S. President George W. Bush, must be pursued by all countries to the end until the world really is safe.

Mumbai tells us this war is far from being concluded, more than seven years after the 9/11 suicide hijackings in the United States. The coordinated attack on 10 different targets in India's

busiest city warns us once again that, lest we are vigilant, terrorists can hit any place at any time. We have seen it all before, in the beach resorts of Bali, in Jakarta, in London, in Madrid, as well as in New York and the Pentagon.

One thing that connects these attacks is their perpetrators' adoption of Islam as the cause. Jihad, the Islamic term for waging war against evil, has now become synonymous with suicide bombings. Whatever motivated these terrorists to launch their evil acts, they have been successful in one area: nurturing the growth of the ever-widening rift between Islam and the West and now, after Mumbai, probably between Islam and Hinduism, the dominant religion in India.

Thankfully, the world is still led largely by people wise enough not to take the bait, thus preventing full-scale religious wars from erupting across the globe.

Some of the responses in the global war on terror have been unfortunate, such as the U.S. bombing of Afghanistan and the invasion of Iraq. Predictably, the United States and its allies are now stuck in two wars that they cannot seem to win, but they have left behind a sour aftertaste in the Islam/West divide.

By and large, however, we have enough leaders around the world who understand the situation much better and believe that the use of military force can only ever be a last resort in this kind of war.

Indonesia's own experience shows that other means -- better intelligence, stronger policing, strict law enforcement, dialogues and eradication of poverty -- have a much better chance of succeeding.

Indonesia, described as the second front line in the global war on terror, has significantly improved its intelligence and police to be able to defuse new terrorist threats.

They have yet to arrest the master terrorist, Malaysia's Noordin M. Top, but they have been able to keep him constantly on the run so that he has not had time to pause, recruit and train the next batch of suicide bombers. At this rate, it should be only a matter of time before Noordin is arrested.

Indonesia also leads the world in pursuing this war in accordance with international laws. There is no Guantanamo or Abu Ghraib here. Last month, Indonesia executed three terrorists after they had exhausted all legal channels for a stay of execution. Hundreds of other terrorists are now languishing in jail after being convicted in open trials. They had their due legal process and they have their just punishments.

Indonesia should also regard itself as being on the front line in waging a war against the violent ideology that is exploiting or hiding behind the name of Islam. As the country with the world's largest Muslim population, it is a task that Indonesia really should take on to help remove this violent streak from what should be a peaceful religion.

Various interfaith dialogues at the national and international levels, some of which are facilitated by the government, are Indonesia's main contribution to containing the global war on terror from widening into major religious conflicts.

The government must also continue with its efforts to usher in greater prosperity, as history tells us that violent ideology flourishes fastest among poor people.

We say our prayers and send our condolences to the victims of these latest terrorist attacks in Mumbai. But looking ahead, countries around the world must join hands in pursuing this war on terror and in preventing any consequent religious conflicts, which would only further the terrorists' interests. This war cannot be pursued individually. It has to be a concerted effort.

We have vested interests in the successful conclusion of this war, not only for the sake of global peace, but more importantly for peace and prosperity in pluralist and multireligious Indonesia. (The Jakarta Post)

2. Adam Malik Tetap Pahlawan

Kita buka dengan mengutip pendapat Mensesneg Hatta Raja- sa tentang isu buku Tim Wiener yang menulis mantan Wapres Adam Malik sebagai anggota CIA.

"Tuduhan dalam buku itu berlebihan. Namun, bangsa Indonesia tidak perlu emosional menanggapi. Jika mengikuti emosi, pastilah bangsa Indonesia emosi. Namun, tetap tenang. Balas (tuduhan) dengan tulisan" (Kompas, Sabtu, 29 November halaman 2).

Pernyataan Mensesneg benar dan bijak. Bagi bangsa Indonesia, segala sesuatu yang berkonotasi dengan CIA peka, sensitif, dan negatif. Terutama dalam konteksnya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Perang Dingin, dan penegakan politik bebas aktif Indonesia. Gambaran semacam itu bahkan juga tecermin dalam judul buku karya wartawan The New York

Times itu, yakni Membongkar Kegagalan CIA atau dalam bahasa aslinya *Legacy of Ashes, the History of CIA*.

Meskipun demikian, karena konteks sejarah di atas (sejarah CIA dalam kaitannya dengan pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia), tulisan yang menyangkut Adam Malik itu sensitif lagi provokatif. Terutama di antara kita yang mengenal langsung ideologi, pergerakan, dan perjuangan Bung Adam Malik sejak muda sampai akhirnya menjabat wakil presiden. Tidak masuk akal bahkan "absurd" pernyataan bahwa Bung "Kecil" itu—sebagai kontras terhadap Bung Besar, yakni Bung Karno—adalah agen CIA.

Argumen negasi itu sangat kuat, di antaranya dilihat dari sudut ideologi dan gerakan politik Bung Adam sejak muda, yakni gerakan Partai Murba-nya Tan Malaka, sikap, pernyataan, dan aktivitas politiknya dalam pergerakan ataupun dalam pemerintahan kemudian. Adalah benar, meskipun sebutlah ideologi politiknya radikal dan revolusioner, sikap, pernyataan, dan tingkah laku politik Bung Adam tenang dan rasional.

Sepanjang kita mengikuti jejaknya sejak pergerakan kemerdekaan, perang kemerdekaan, diplomasi kemerdekaan Indonesia, sampai beragam jabatannya yang berakhir sebagai wakil presiden, sosok revolusioner tapi tenang dan diplomatik itulah kesan kuat yang kita peroleh. Sampai akhirnya setelah wafat, Bung Adam memperoleh gelar Pahlawan Nasional, sosok dan gelar itu tetap kuat. Keyakinan itu yang menyebabkan riak reaksi atas terbitnya buku itu, tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Mensesneg dan banyak di antara kita.

Penerbitan buku semacam itu, pada sisi lain, memberikan pengalaman dan pembelajaran. Masuk akal, dengan lajunya perjalanan sejarah, terhadap masa lampau, peristiwa, ataupun peranan para pelakunya, bisa timbul narasi yang berbeda fakta ataupun interpretasinya. Meskipun disertai kejujuran, keahlian, dan tanggung jawab penulis atau ahlinya, perubahan fakta dan interpretasi bisa terjadi. Hal semacam itu logis jika bisa menimbulkan beberapa reaksi. Maka, lagi-lagi relevanlah saran Mensesneg agar reaksi kita tidak emosional, tetapi rasional dan terkendali. (Kompas)

Jakarta, 1 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu